



## **Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan Terhadap Kinerja Koordinasi UPT Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kerja UPT Di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut**

Muhamad Topan Parid

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

### **Abstrak**

Penelitian ini didasarkan pada permasalahan UPT yang dihadapi diantaranya capaian program kerja UPT yang masih rendah. Belum optimalnya kinerja koordinasi UPT diduga sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan yang belum optimal sehingga menyebabkan efektivitas pencapaian program kerja UPT belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan terhadap kinerja koordinasi UPT dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program kerja UPT. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi analisis dengan teknik survey, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian ini adalah statistik dengan model analisis jalur (path analysis). Populasi dan responden dalam penelitian ini adalah pegawai dari seluruh UPT yang berada di wilayah kecamatan samarang sebanyak 122 responden yang diambil berdasarkan teknik sampel jenuh (Sensus). Hasil pengujian hipotesis utama menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$   $35,0542 > 1,9803$ . Dari nilai tersebut diperoleh keputusan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya variabel pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan (X) berpengaruh terhadap variabel kinerja koordinasi UPT (Y) dan variabel efektivitas pencapaian program kerja UPT (Z). Adapun besaran pengaruh dari variabel bebas sebesar 89,10% sedangkan sisanya 10,90% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti (epsilon).

**Kata Kunci:** Analisis Path, Kinerja Koordinasi UPT, Efektivitas Pencapaian Program Kerja UPT, Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan.

### **1. Pendahuluan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 18 ayat 1 mengamanatkan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Pada ayat 2 disebutkan, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian pada ayat 5 disebutkan, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Sehubungan penyelenggaraan otonomi daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan pengertian otonomi daerah adalah hak wewenang, kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aturan perundang undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menegaskan kembali kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah. Dimana disana disebutkan bahwa Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana serta intensitas yang tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut sangat jelas mengindikasikan bahwasanya Camat dalam menjalankan tugasnya memiliki tugas dan kewenangan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan. Dengan kata lain, semua bentuk kegiatan pemerintahan yang berada di wilayah kecamatan berada dalam koordinasi Camat sebagai kepala kecamatan.

Sebagaimana telah diketahui bahwasanya koordinasi merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang berkaitan dengan upaya untuk mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyelaraskan, mengsinkronisasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam organisasi atau antar organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Sugandha, 2002). Dibiidang pemerintahan, koordinasi merupakan fungsi manajemen pemerintahan yang berkaitan dengan usaha mencapai keserasian, keseimbangan, dan sinkronisasi, serta integrasi keseluruhan kegiatan pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien di wilayah kecamatan (Handayaniingrat, 2000).

Di wilayah Kecamatan Samarang Kabupaten Garut terdapat beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan daerah seperti UPT Pertanian, UPT Peternakan, UPT Distarkim, UPT PUPR, UPT Pasar, UPT DPPKBP3A, UPT Puskesmas Samarang, UPT Puskesmas Sukakarya, dan UPT Pendidikan. (Kantor Kecamatan Samarang, 2020). Di wilayah Kecamatan Samarang juga terdapat beberapa Instansi Vertikal seperti Polsek, Koramil, dan unit kerja lainnya. Berdasarkan observasi awal peneliti mengenai pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan di Samarang Kabupaten Garut terdapat beberapa permasalahan yaitu, pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh, Kinerja Koordinasi UPT dirasa belum maksimal, serta Efektivitas Pencapaian Program Kerja UPT Kecamatan belum efektif tidak sesuai dengan tujuan dan SOP yang telah dirancang.

Adapun keterkaitan konsep secara teoritis, terdapat dugaan adanya hubungan causal effectual (sebab akibat) dari fakta - fakta masalah tersebut yang perlu diteliti, yakni belum efektifnya pencapaian program kerja UPT diduga dipengaruhi oleh kinerja koordinasi UPT yang disebabkan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan. Dari pernyataan tersebut, penting dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah-masalah tersebut dengan judul: "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan Terhadap Kinerja Koordinasi UPT Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kerja UPT di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut".

Model konseptual penelitian yang diharapkan akan menjadi *guideline* bagi pemecahan masalah yang diajukan pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 dengan rumusan hipotesis berikut:

### Hipotesis Utama

- $H_0$  : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan koordinasi Pemerintahan Kecamatan terhadap kinerja koordinasi UPT dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program kerja UPT di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.
- $H_1$  : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan koordinasi Pemerintahan Kecamatan terhadap kinerja koordinasi UPT dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program kerja UPT di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut

### Sub Hipotesis 1

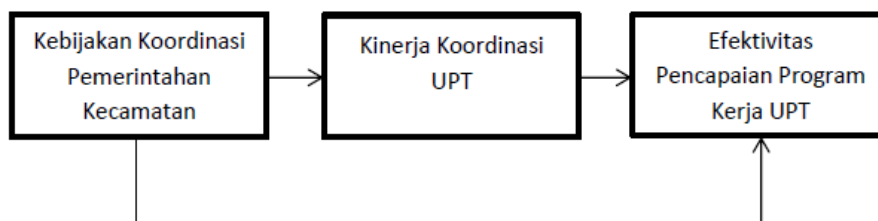
- $H_0$  : Tidak ada pengaruh pelaksanaan kebijakan koordinasi Pemerintahan Kecamatan terhadap Kinerja koordinasi UPT.
- $H_1$  : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan koordinasi Pemerintahan Kecamatan terhadap Kinerja koordinasi UPT.

### Sub Hipotesis 2

- $H_0$  : Tidak ada pengaruh pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan terhadap efektivitas pencapaian program kerja UPT di kecamatan samarang kabupaten garut.
- $H_1$  : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan terhadap efektivitas pencapaian program kerja UPT di kecamatan samarang kabupaten garut.

### Sub Hipotesis 3

- $H_0$  : Tidak ada pengaruh Kinerja UPT terhadap efektivitas pencapaian program UPT di kecamatan samarang kabupaten garut.
- $H_1$  : Terdapat pengaruh Kinerja UPT terhadap efektivitas pencapaian program kerja UPT di kecamatan samarang kabupaten garut.



**Gambar 1. Model Konseptual Penelitian**

## 2. Metodologi

### 2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif ilmu administrasi dengan mengembangkan konsep faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian program kerja UPT dengan batasan ruang lingkup mengenai pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan, kinerja

koordinasi UPT dan efektivitas pencapaian program kerja UPT di kecamatan samarang kabupaten garut. Dengan memperhatikan variabel-variabel yang dianalisis, maka penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survei dan tingkat eksplanasi asosiatif/hubungan. Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa metode penelitian kuantitatif didasarkan pada paradigma positivisme yang bersifat *logico-hypothetico-verifikatif* bertolak dari studi pendahuluan pada objek yang diteliti (*preliminary study*) melalui fakta-fakta empiris. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya, sehingga penelitian ini tersusun sistematis, terencana, terstruktur, jelas dari awal hingga akhir penelitian dan tidak dipengaruhi oleh keadaan yang ada pada lapangan (Hardani, et al., 2020).

Untuk memperoleh informasi atau data aktual yang mendukung penelitian, maka dilakukan teknik survei karena mampu menggambarkan karakteristik variabel-variabel tertentu dari suatu permasalahan atau fenomena, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Purwanto & Sulistyastuti (2017) bahwa penelitian survei akan menghasilkan informasi kuantitatif tentang opini publik, karakter/sikap, maupun fenomena sosial.

## 2.2 Populasi dan Sampel

Berdasarkan substansi pokok penelitian yang dilakukan, sasaran populasi (*population target*) dalam penelitian ini yaitu pegawai UPT di Samarang Kabupaten Garut yang sudah berkontribusi pada kegiatan lintas sektor di tahun 2020 sampai dengan periode bulan April adalah sebanyak 122 orang. Teknik *sampling* yang digunakan pada penelitian ini termasuk ke dalam kategori *nonprobability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2014). Peneliti menggunakan *sampling* jenuh atau sensus, artinya seluruh elemen populasi dijadikan sampel penelitian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan jumlah populasi yang relatif kecil. Pendekatan pengolahan dan analisis data menggunakan *analysis path*.

## 2.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yang disusun menggunakan skala *Likert* dengan gradasi sangat positif sampai sangat negatif. Pemberian nilai skor pada setiap alternatif jawaban dikelompokkan dalam suatu data berskala ordinal dengan kategori sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

## 2.4 Teknik Analisis Data

Teknik yang akan digunakan dalam menganalisis data adalah analisis struktur dengan model analisis jalur (*path analysis*) yang dimaksudkan untuk menjelaskan apakah terdapat pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel antara maupun terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis dilakukan secara langsung melalui pengujian masing masing hipotesis dengan memperhatikan nilai koefisien jalur untuk setiap hipotesis, dengan enam tahapan utama meliputi tahap penyusunan matrik korelasi, Menguji Koefisien jalur  $py_x$ , Membuat Invers Matrik korelasi ( $R^{-1}$ ), Menghitung besar pengaruh, Menentukan besar pengaruh variabel lain, dan Menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Uji Hipotesis

#### 3.1 Pengujian Hipotesis Utama Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan (X) Terhadap Kinerja Koordinasi UPT (Y) Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kerja UPT (Z) di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut

Rumusan hipotesis utama yang diajukan adalah:

H<sub>0</sub> : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan koordinasi Pemerintahan Kecamatan terhadap kinerja koordinasi UPT dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program kerja UPT di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan koordinasi Pemerintahan Kecamatan terhadap kinerja koordinasi UPT dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program kerja UPT di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan pengujian analisis jalur, dengan tahapan sebagai berikut:

#### a. Mendefinisikan Variabel:

Diketahui :

$$\begin{aligned} N &= 122 \\ K &= 3 \\ \alpha &= 0,05 \end{aligned}$$

#### b. Membuat Matriks Korelasi (R), Dengan Menggunakan Persamaan:

$$R = \begin{bmatrix} r_{XX} & r_{YX} & r_{ZX} \\ & r_{YY} & r_{YZ} \\ & & r_{ZZ} \end{bmatrix}$$

Di mana:

$$\begin{aligned} r_{YX} &= \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[(\sum X^2) - (\sum X)^2][(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}} \\ r_{YZ} &= \frac{n \sum YZ - (\sum Y)(\sum Z)}{\sqrt{[(\sum Y^2) - (\sum Y)^2][(\sum Z^2) - (\sum Z)^2]}} \\ r_{ZX} &= \frac{n \sum XZ - (\sum X)(\sum Z)}{\sqrt{[(\sum X^2) - (\sum X)^2][(\sum Z^2) - (\sum Z)^2]}} \end{aligned}$$

Persamaan di atas digunakan untuk menghitung input data analisis jalur, berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus di atas, diperoleh nilai matriks korelasi sebagai berikut :

	X	Y	Z
X	1,0000	0,9545	0,9305
Y	0,9545	1,0000	0,9354
Z	0,9305	0,9354	1,0000

Sebagaimana perhitungan tersebut diperoleh koefisien korelasi ( $r$ ) untuk masing masing variabel adalah:

$$r_{YX} = 0,9545, r_{XZ} = 0,9305, r_{YZ} = 0,9354$$

### c. Mencari Koefisien Jalur PXY

Mencari  $t_{hitung}$  :

$$t = \frac{P_{YX}}{\sqrt{\frac{1 - P_{YX}^2}{n - 2}}} \text{ dimana } P_{YX} = r_{YX}$$

$$t = \frac{0,9545}{\sqrt{\frac{1 - 0,9545^2}{122 - 2}}}$$

$$t_{hitung} = 35,0542$$

Mencari  $t_{tabel}$  :

$$t_{tabel} = \alpha : n - 2$$

$$t_{tabel} = 0,05 : 122 - 2$$

$$t_{tabel} = 1,9803$$

$$t = \frac{P_{YX}}{\sqrt{\frac{1 - P_{YX}^2}{n - 2}}} \text{ dimana } P_{YX} = r_{YX}$$

$$\left. \begin{array}{l} t_{hitung} = 35,0542 \\ t_{tabel} = 1,9803 \end{array} \right\} \text{ Signifikan}$$

### d. Membuat Matrik Invers Korelasi ( $R^{-1}$ )

$$R^{-1} = \begin{bmatrix} C_{XX} & C_{YX} & C_{ZX} \\ & C_{YY} & C_{YZ} \\ & & C_{ZZ} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12,8821 & -8,6653 & -3,8809 \\ -8,6653 & 13,8316 & -4,8755 \\ -3,8809 & -4,8755 & 9,1720 \end{bmatrix}$$

### e. Menghitung Besarnya Pengaruh

$$P_{ZX} = -\frac{C_{ZX}}{C_{ZZ}} = \frac{-3,8809}{9,1720} = 0,4231$$

$$P_{ZY} = -\frac{C_{ZY}}{C_{ZZ}} = \frac{-4,8755}{9,1720} = 0,5316$$

#### f. Menghitung Koefisien Determinasi Total

Dengan menggunakan rumus  $R_{ZYX}^2 = P_{ZX} \cdot r_{ZX} + P_{ZY} \cdot r_{ZY}$ , maka diperoleh rumus determinasi total

$$\begin{aligned} R_{ZYX}^2 &= 0,4231 \times 0,9305 + 0,5316 \times 0,9354 \\ R_{ZYX}^2 &= 0,4020 + 0,4972 \\ R_{ZYX}^2 &= 0,8910 \\ R_{ZYX} &= 0,9439 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, diperoleh nilai koefisien jalur ( $PYZX$ ) sebesar 0,8910. Selanjutnya untuk menjawab hipotesis yang diajukan, maka dilakukan dengan pengujian dengan menggunakan uji F, yaitu melihat perbandingan antara  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$ , Nilai  $F_{hitung}$  diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{(n - k - 1)R^2}{k(1 - R^2)}$$

Di mana:

$K$  = Jumlah Variabel  
 $n$  = Jumlah Responden  
 $R$  = Koefisien Korelasi

Sehingga:

$$\begin{aligned} F_{hitung} &= \frac{(n - k - 1)R^2}{k(1 - R^2)} = \frac{(122 - 3 - 1)0,8910}{3(1 - 0,8910)} = \frac{(118)0,8910}{3(0,109)} = \frac{167,508}{0,327} \\ &= 321,52229 \end{aligned}$$

Dengan  $n = 122$ ,  $\alpha = 0,05$  dan  $df = 122 - 1 = 121$

Sehingga  $df(n1) = k - 1 = 3 - 1 = 2$  dan  $df(n2) = n - k = 122 - 3 = 119$

Maka diperoleh  $F_{tabel} = 3,07$

Dari nilai tersebut diperoleh keputusan menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ , sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan (X) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Koordinasi UPT (Y) dalam mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kerja UPT (Z) di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan terhadap kinerja koordinasi UPT dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program kerja UPT di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, maka dapat dilakukan pengujian yaitu menguji koefisien jalur dengan mencari dan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  dengan tahapan sebagai berikut:

Mencari  $t_{hitung}$  :

$$t_{ZYX} = \frac{R_{ZYX}}{\sqrt{\frac{1 - R_{ZYX}^2}{n - 2}}}$$

$$t_{ZYX} = 35,0542$$

Mencari  $t_{tabel}$ :

$$t_{tabel} = (\alpha : n - k - 1)$$

$$t_{tabel} = (0,05 : 122 - 3 - 1)$$

$$t_{tabel} = 0,05 : 122 - 2$$

$$t_{tabel} = 1,9803$$

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai *thitung* sebesar 35,0542 lebih besar dari  $t_{tabel} = 1,9803$ . Dari nilai tersebut dapat ditarik kesimpulan statistik bahwa  $H_0$  ditolak, artinya variabel bebas sebagai faktor penyebab yaitu, dimensi, indikator, dan butir-butir item tersebut telah dilaksanakan sehingga berpengaruh sebesar 89,10% terhadap faktor akibat yaitu Variabel (Y) dan (Z).

Sedangkan sisanya sebesar 0,1090 atau sebesar 10,90% dipengaruhi oleh variabel lain (epsilon) yang tidak teramati pada penelitian ini. Variabel lain tersebut diduga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan. Variabel tersebut antara lain adalah kepemimpinan camat.

Nilai tersebut diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$(RYZX)^2$	0,8910	89,10%
$(PZe2)^2$	0,1090	10,90%

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan berpengaruh besar karena adanya sejumlah Dimensi, Indikator, dan Butir-butir item yang menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut. Butir-butir item terkait pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan yang berjalan dengan sangat baik menyebabkan kinerja koordinasi UPT berjalan dengan baik, sehingga pada akhirnya dapat berdampak pada tercapainya efektivitas pencapaian program kerja UPT yang optimal.

Hasil penelitian memberikan preposisi jawaban bahwa semakin baik pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan, maka akan semakin baik pula kinerja koordinasi UPT, dan efektivitas pencapaian program kerja UPT pun akan semakin membaik. Atau dengan kata lain apa bila kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan dilaksanakan dengan secara optimal, maka akan berpengaruh terhadap kinerja koordinasi UPT dan efektivitas program kerja UPT akan menjadi semakin optimal, begitupun sebaliknya.

Hasil penelitian ini juga berimplikasi pada semakin kuatnya hubungan konseptual dari teori yang melandasi variabel penelitian. Sebagaimana diketahui bahwa teori memiliki asumsi, dimana keberlakuannya sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang ada dimana teori tersebut diterapkan. Besarnya hubungan antara konsep pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan terhadap kinerja koordinasi UPT dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program kerja UPT, telah dibuktikan bahwa satu sama lainnya memiliki keterkaitan dan korelasi yang signifikan.



Koordinasi UPT yang berjalan dengan baik menyebabkan organisasi (UPT) menjadi lebih terarah dan terkendali, karena dijalankan berdasarkan komunikasi, kerjasama, sinkronisasi, serta integrasi yang optimal. Koordinasi yang baik pada akhirnya akan berdampak pada kerja organisasi yang baik. Sebagaimana dikemukakan Stoner dan Wankel (2006) bahwa “Koordinasi merupakan proses untuk mengintegrasikan berbagai tujuan dan aktivitas dalam satuan yang berbeda (departemen maupun divisi fungsional) pada organisasi guna meraih tujuan organisasi seefisien mungkin”.

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik organisasi, lingkungan sosial budaya dan politik, serta disposisi (sikap aparatur), menentukan terhadap kinerja koordinasi UPT yang pada gilirannya berpengaruh terhadap efektivitas pencapaian program kerja UPT. Efektivitas pencapaian program kerja UPT tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan dan kinerja koordinasi UPT saja, namun juga dipengaruhi oleh faktor lain (epsilon) yang tidak diukur pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lain itu terbilang cukup besar yakni 10,90%. Besaran faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pencapaian program kerja UPT tersebut disebabkan karena faktor-faktor tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya dan memberikan kontribusi terhadap efektivitas pencapaian program kerja UPT secara keseluruhan.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan terhadap kinerja koordinasi UPT dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program kerja UPT di kecamatan samarang kabupaten gaurt, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pengujian Sub Hipotesis 1 : Pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja koordinasi UPT. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin optimalnya pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan, maka kinerja koordinasi UPT akan meningkat.

Pengujian Sub Hipotesis 2 : Pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pencapaian program kerja UPT. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas pencapaian program kerja UPT dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan.

Pengujian Sub Hipotesis 3 : Kinerja koordinasi UPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pencapaian program kerja UPT. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas pelaksanaan program kerja UPT tidak terlepas dari aspek-aspek yang ada pada kinerja koordinasi UPT yaitu : komunikasi, kerjasama, sinkronisasi, dan integritas.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih atas dukungan dari Program Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Garut yang telah mempublikasikan karya ilmiah ini serta kepada semua pihak yang terkait dalam membantu proses penelitian ini.

## Daftar Pustaka

- Akdon. 2008. Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian untuk Administrasi & Manajemen. Bandung : Dewa Ruchi.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hardani, H. A., Ustiawaty, J., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sykmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group. Hal. 238, 242, 303.
- Iskandar. Jusman. (2017). *Beberapa Indeks dan Skala Pengukuran Variabel- Variabel Sosial dan Psikologi*. Edisi Ketujuh Belas. Puspaga. Bandung.
- Islamy, La Ode. (2017). *Collaborative Governnace, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta. Deepublish Publiser
- KAdji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Prilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Nugroho. (2004). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Stoner L. J. dan Carles, W. (2006). *Manajemen*, terjemah. Jakarta: Intermedia.
- Sun'an, Muammil., & Senuk, Abdurrahman. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Parsons, W. (2014). *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Pasolong, H. (2016). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Program Pascasarjana Universitas Garut. 2020. *Panduan Penulisan Seminar Usulan Penelitian dan Tesis*.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gava Media. Hal. 13, 16, 36, 59.